
PENGARUH WORK-LIFE BALANCE DAN BEBAN KERJA SERTA TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KINERJA SALES MARKETING DI DEALER TOYOTA AUTO 2000 DAN DAIHATSU KOTA SAMARINDA

Dian Irma Aprianti¹, Suyanto², Leony Naobella³

¹²³, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

lnaobella@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effect of Work-Life Balance, Workload, and Education Level on the Performance of Sales Marketing in the Automotive Industry in Samarinda. Sales performance is a crucial factor in the automotive industry, making it essential to understand to understand the factors that influence it. This research employs a quantitative method with a multiple linear regression approach. Data was collected through questionnaires distributed to 74 respondents working as sales marketing professionals at Toyota Auto2000 and Daihatsu in Samarinda City.

The result showed that the Work-Life Balance variable partially has no significant effect on sales marketing performance. In contrast, the Workload and Education Level variables partially have a significance effect on the performance of sales marketing employees. This is evidenced by hypothesis testing, which shows a significance value of $0,206 > 0,05$ for the work-life balance variable and significance values of $0,014 < 0,05$ for the workload variabel and $0,00 < 0,05$ for the education level variable. These findings imply that companies sgould pay greater attention to managing workload and improving the educational quality of employees to support performance enhancement

Keywords: Work-Life Balance, Workload, Education Level, Sales Marketing Performance, Automotive Industry

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis pengaruh Work-Life Balance, Beban Kerja, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kinerja Sales Marketing dalam Industri Otomotif di Kota Samarinda. Kinerja tenaga penjual menjadi faktor krusial dalam industri otomotif, sehingga penting untuk memahami faktor-faktor yang dapat memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan regresi linear berganda. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 74 responden yang bekerja sebagai sales marketing di dealer Toyota Auto2000 dan Daihatsu Kota Samarinda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Work-Life Balance secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja sales marketing. Sedangkan variabel Beban Kerja dan Tingkat Pendidikan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja sales marketing. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji-t yang menunjukkan nilai signifikansi $0,206 > 0,05$ untuk variabel work-life balance dan nilai signifikan $0,014 < 0,05$ untuk beban kerja dan nilai signifikan $0,00 < 0,05$ untuk tingkat pendidikan. Temuan ini memberikan implikasi bahwa

perusahaan perlu memberikan perhatian lebih terhadap pengelolaan beban kerja dan peningkatan kualitas pendidikan karyawan guna mendukung peningkatan kinerja.

Kata Kunci: Work-Life Balance, Beban Kerja, Tingkat Pendidikan, Kinerja Sales Marketing, Industri Otomotif

PENDAHULUAN

Industri otomotif di Indonesia merupakan salah satu sektor yang sangat kompetitif dan bergantung pada kinerja tenaga penjualan (sales marketing). Peran sales marketing menjadi krusial dalam mendorong pertumbuhan penjualan dan mempertahankan daya saing perusahaan. Dalam lingkungan kerja yang dinamis dan penuh tekanan, berbagai faktor dapat memengaruhi kinerja sales, diantaranya Work-Life Balance, Beban Kerja, dan Tingkat Pendidikan. Work-life balance menjadi perhatian utama dalam dunia kerja modern karena diyakini dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Beban kerja yang tinggi sering kali dikaitkan dengan stres dan penurunan performa, sementara tingkat pendidikan dianggap berkontribusi terhadap kompetensi tenaga penjualan dalam menjalankan tugasnya. Namun, hingga saat ini, masih terdapat perbedaan temuan dalam penelitian terkait hubungan faktor-faktor tersebut dengan kinerja sales marketing.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas pengaruh Work-Life Balance terhadap kinerja karyawan. Misalnya, penelitian oleh Susi & Jawahar (2018) menunjukkan bahwa keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi memiliki dampak positif terhadap produktivitas. Di sisi lain studi oleh Fadhila Saifullah (2020) menemukan bahwa Work-Life Balance tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kinerja, terutama dalam industri berbasis target seperti sales. Sementara itu, penelitian mengenai beban kerja dan kinerja memberikan hasil yang beragam. Studi oleh Aron F Polakitang (2019) menyatakan bahwa beban kerja tinggi dapat menurunkan kinerja karena menyebabkan stres kerja. Namun, riset lain oleh Wijiyanto (2021) menyatakan bahwa beban kerja yang tinggi justru dapat meningkatkan performa dalam pekerjaan yang bersifat target-driven. Demikian pula, hubungan antara tingkat pendidikan dan kinerja sales masih menjadi perdebatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendidikan tinggi meningkatkan keterampilan analitis dan komunikasi sales (Putra & Lestari, 2019), tetapi penelitian lain menunjukkan bahwa pengalaman dan pelatihan lebih berperan dibanding tingkat pendidikan formal (Yusuf et al., 2022).

Berdasarkan kajian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Mayoritas penelitian sebelumnya dilakukan dalam konteks industri yang berbeda atau berfokus pada profesi selain sales marketing. Selain itu, hasil penelitian yang beragam mengindikasikan bahwa hubungan antara Work-Life Balance, Beban Kerja, dan Tingkat Pendidikan dengan kinerja sales marketing masih belum sepenuhnya dipahami, terutama dalam industri otomotif di Samarinda. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan menguji secara empiris apakah faktor-faktor tersebut benar-benar memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja sales marketing dalam industri otomotif.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Work-Life Balance, Beban Kerja, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kinerja Sales Marketing dalam Industri Otomotif di Kota Samarinda. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan dalam memahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tenaga penjualan mereka, serta memberikan wawasan bagi akademis mengenai kompleksitas faktor yang menentukan performa sales dalam industri berbasis target. Dari sisi kebaruan (novelty),

penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih kontekstual dengan fokus kepada sales marketing di industri otomotif, yang masih belum banyak diteliti secara spesifik dalam kajian sebelumnya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi praktis bagi perusahaan dalam merancang strategi pengelolaan tenaga sales yang lebih efektif serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang sumber daya manusia dan pemasaran.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini berlatar belakang keilmuan sumberdaya manusia dan perilaku organisasi. Variabel independen, Work-Life Balance, Beban Kerja, dan Tingkat Pendidikan merupakan bagian dari kajian manajemen sumber daya manusia. MSDM menurut Gary Dessler (2011:5) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia, menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan praktik menentukan aspek “manusia” atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan dan penilaian.

Sedangkan perilaku organisasi, menurut Robin & Judge (2011:10) didalam karyanya yang berjudul Organizational Behavior, menyatakan bahwa perilaku organisasi merupakan studi yang mempelajari dampak dari perilaku individu, kelompok, dan struktur terhadap organisasi dengan tujuan menerapkan pengetahuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Perkembangan konsep perilaku berakar pada pemahaman bahwa organisasi perlu mengatur hubungan antara tenaga kerja atau karyawan. Pengelolaan kemampuan ini terutama dalam aspek hubungan antarpribadi keterampilan hubungan manusia, komunikasi, aktivitas jaringan maupun fungsi kepemimpinan, semuanya berfokus pada bagaimana atasan atau manajer mengembangkan kemampuan mereka dalam berinteraksi secara aktif dengan karyawan. Perilaku organisasi mengkaji hubungan antara individu dan kelompok dalam suatu organisasi serta bagaimana perilaku mereka memberi pengaruh pada kinerja organisasi.

Work-life balance adalah suatu keadaan di mana individu dapat mengelola tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadinya secara seimbang tanpa mengalami konflik yang signifikan antara keduanya. Greenhaus, dkk (2003) dalam teorinya keseimbangan kerja-hidup, mengemukakan bahwa keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi sangat penting untuk kesejahteraan individu. Ketidakeimbangan dapat menyebabkan stress dan kelelahan yang berdampak negatif pada kinerja. Hudson (2005:3) dalam bukunya yang berjudul The Case for Work-Life Balance menyatakan bahwa work-life balance merupakan tingkat kepuasan yang berkaitan dengan peran ganda dalam kehidupan seseorang dengan indikator yaitu: keseimbangan waktu, keseimbangan keterlibatan, dan keseimbangan kepuasan.

Beban kerja merupakan sesuatu yang secara otomatis melekat dan akan diterima oleh individu sebagai penanggung jawab dalam suatu pekerjaan. Beban yang diterima oleh individu sebagai penanggung jawab dalam suatu pekerjaan beberapa ahli dalam buku Antonio (2020:2) dengan judul beban kerja dan stres kerja, menguraikan beban kerja sebagai mana berikut ini: Nurmianto (2003), menyatakan tentang beban kerja yang mana merupakan sekumpulan atau sejumlah tugas yang perlu diselesaikan oleh pekerja dalam batas waktu tertentu. Irwandy (2007), memaparkan bahwasannya beban kerja adalah rata-rata frekuensi kegiatan dari setiap pekerjaan dalam periode waktu tertentu. Haryanto (2010), menguraikan bahwanya beban kerja adalah sekumpulan tugas yang perlu diselesaikan oleh individu atau kelompok dalam jangka waktu tertentu selama aktivitas kerja berlangsung secara normal. Adapun menurut Koesomowidjojo

(2017:21) menyatakan bahwa beban kerja adalah proses menetapkan jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam kurun waktu tertentu dengan indikator beban kerja menurut Koesomowidjojo (2017:21) yaitu: Kondisi pekerjaan, penggunaan waktu kerja, dan target yang harus dicapai.

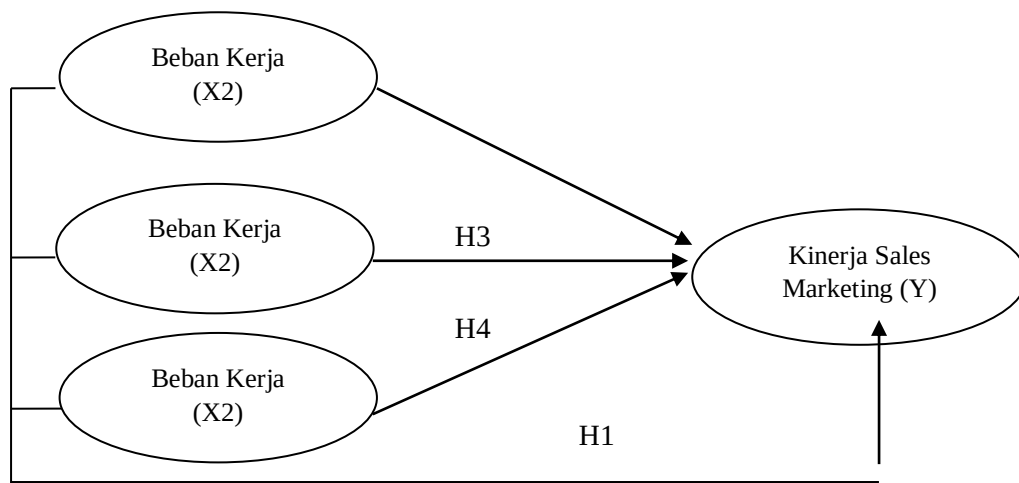
Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang dikembangkan. Lantip Diat Prasajo, dkk (2017:65) dalam bukunya Manajemen Strategi Human Capital dalam Pendidikan menyatakan bahwa tingkat pendidikan mengacu pada jenjang atau level pendidikan yang telah ditempu seseorang sebagai proses formal untuk mengembangkan potensi diri. Dengan indikator yaitu: jenjang pendidikan, kesesuaian jurusan, dan kompetensi.

Hubungan Work-Life Balance terhadap Kinerja Karyawan Menurut Hudson (2005:13) dalam bukunya yang berjudul The Case for Work-Life Balance menyatakan bahwa terdapat 9 manfaat bagi pemberi kerja dan karyawan dalam menyediakan dan mendukung keseimbangan kerja-hidup karyawan yaitu peningkatan kinerja, peningkatan retensi karyawan, mengurangi keluar-masuknya karyawan, mendapatkan karyawan potensial, kesehatan psikologi dan mental yang lebih baik, kembali lebih awal cuti hamil, mengurangi ketidakhadiran (absent), meningkatkan kepuasan kerja dan meningkatkan citra positif perusahaan.

Hubungan Beban Kerja terhadap Kinerja Karyawan Menurut Koesomowidjojo (2017:35), dalam bukunya Panduan Praktis Menyusun Analisis Beban Kerja menyatakan bahwa “salah satu faktor yang menentukan tinggi atau rendahnya kinerja suatu pegawai adalah merata atau tidaknya pembagian beban kerja”. Karena beban kerja yang berlebihan baik secara fisik maupun mental dapat menyebabkan stres, kelelahan, dan penurunan kinerja karyawan.

Hubungan Tingkat Pendidikan terhadap Kinerja Karyawan Lantip (2017:20) dalam bukunya Manajemen Strategi Human Capital dalam Pendidikan, Menyatakan bahwa: “Pendidikan adalah investasi modal manusia dalam bentuk waktu dan biaya yang dipandang sebagai salah satu bentuk investasi modal manusia (Human Capital) yang paling penting, baik bagi individu maupun organisasi. Manfaat yang diperoleh bagi individu adalah selain pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam waktu yang tidak dapat ditentukan akan memberikan peningkatan pendapatan, sedangkan manfaat bagi organisasi yaitu pegawai/karyawan yang sudah melakukan pendidikan dapat meningkatkan produktivitas kerja dan kinerja”.

Tingkat pendidikan memiliki peran signifikan dalam menentukan kompetensi individu, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas human capital (modal manusia) dalam sebuah organisasi atau institusi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar peluang untuk memiliki kemampuan analitis, pemecahan masalah, serta pengetahuan yang mendalam dalam bidang tertentu yang semuanya berkontribusi pada produktivitas dan kinerja.



Gambar 1.1 Kerangka Konsep
Sumber: Data Olahan Peneliti

Hipotesisi penelitian merupakan jawab atau dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Hutauruk, 2022:107). Merujuk pada model konseptual di atas, hipotesis dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. H1 : Work-Life Balance, Beban Kerja dan Tingkat Pendidikan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kinerja Sales Marketing di Dealer Toyota Auto2000 dan Daihatsu Kota Samarinda.
2. H2: Work-Life Balance berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kinerja Sales Marketing di Dealer Toyota Auto2000 dan Daihatsu Kota Samarinda.
3. H3: Beban Kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kinerja Sales Marketing di Dealer Toyota Auto2000 dan Daihatsu Kota Samarinda
4. H4: Tingkat Pendidikan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kinerja Sales Marketing di Dealer Toyota Auto2000 dan Daihatsu Kota Samarinda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bertujuan meneliti suatu objek untuk memberikan gambaran, deskripsi, atau lukisan secara objektif dan sistematis mengenai fakta-fakta, ciri-ciri, serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu. Pendekatan ini dipilih karena relevan dengan tujuan penelitian, yaitu memahami secara mendalam persepsi pengelola keuangan desa terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Menurut Moleong (2008: 6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena yang dialami oleh subjek, seperti perilaku, persepsi, motivasi, maupun tindakan secara holistik, melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah, serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Oleh

karena itu, penelitian ini tidak hanya menekankan pada angka atau statistik, tetapi lebih pada pemaknaan dan interpretasi data yang diperoleh dari lapangan.

Definisi operasional dalam penelitian ini diperlukan agar variabel yang diteliti dapat diukur secara jelas. Variabel pertama adalah persepsi pengelola keuangan desa yang mencakup pemahaman, sikap, dan pandangan mereka terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Indikator yang digunakan untuk mengukurnya meliputi tingkat pemahaman terhadap regulasi keuangan desa, sikap terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta kesadaran terhadap konsekuensi kecurangan akuntansi.

Variabel kedua adalah kecenderungan kecurangan akuntansi (*accounting fraud tendency*) yang diadaptasi dari *Fraud Diamond Theory*. Indikator variabel ini terdiri atas tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), dan kemampuan (*capability*). Tekanan dapat berupa kebutuhan ekonomi atau tekanan dari atasan, peluang muncul dari lemahnya sistem pengawasan, rasionalisasi berupa pembenaran pribadi terhadap perilaku menyimpang, sedangkan kemampuan berkaitan dengan posisi maupun pengetahuan yang memungkinkan seseorang melakukan kecurangan.

Informan dalam penelitian ini terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara atau Kaur Keuangan, Ketua BPD, serta perwakilan masyarakat atau Ketua RT. Jumlah keseluruhan informan sebanyak 16 orang, yang dipilih karena memiliki keterlibatan langsung maupun pandangan kritis terhadap pengelolaan keuangan desa. Pemilihan informan ini diharapkan dapat memberikan data yang beragam dan kaya akan perspektif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dari informan terkait persepsi dan pengalaman mereka. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung praktik pengelolaan keuangan desa, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa arsip, laporan, maupun dokumen resmi yang relevan. Kombinasi ketiga teknik ini dimaksudkan agar data yang diperoleh lebih lengkap dan dapat saling melengkapi.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman (1994), yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi penting dari catatan lapangan, penyajian data disusun dalam bentuk narasi atau tabel agar lebih mudah dipahami, sedangkan penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan untuk menemukan pola, makna, serta menguji keabsahan data melalui triangulasi. Dengan langkah ini, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara, bisa disimpulkan bahwa pengelola utama seperti Kepala Desa, Sekretaris, dan Bendahara/Kaur Keuangan umumnya sudah paham mengenai aturan-aturan dalam pengelolaan keuangan desa seperti Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Mereka tahu bahwa setiap pengeluaran harus sesuai dengan APBDes, dan ada dokumen-dokumen yang harus dibuat seperti laporan realisasi anggaran, buku kas, dan sebagainya.

Hasil wawancara dengan informan Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara/Kaur Keuangan Ia menyampaikan bahwa:

- Kalau soal aturan dana desa kami diajari waktu pelatihan, dan juga sering dikasih tahu dari pendamping desa. Semua harus pakai tanda tangan, bukti nota, dan sesuai perencanaan. (IF 01,02,03 KepDes, SekDes, Bend/Kk, 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa secara administratif dan normatif, pengelola memahami bahwa setiap belanja desa harus didasari oleh perencanaan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Mereka mengetahui pentingnya dokumen seperti buku kas umum, laporan realisasi anggaran, serta bukti transaksi dalam proses akuntabilitas publik. Bagian ini memuat hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis (jika menggunakan hipotesis) menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, temuan-temuan dan menginterpretasikan temuan-temuan. Hasil penelitian juga menjelaskan mengapa, bagaimana dan seterusnya.

Namun demikian, ketika hal yang sama ditanyakan kepada masyarakat, khususnya para Ketua RT dan warga biasa, ditemukan adanya kesenjangan pemahaman. Sebagian besar masyarakat hanya mengetahui secara umum bahwa dana desa digunakan untuk pembangunan atau kegiatan sosial, tetapi tidak mengetahui secara spesifik bagaimana mekanisme, proses, serta regulasi yang mengaturnya.

Hasil wawancara dengan informan Ketua Rt/Masyarakat Desa Ia menyampaikan bahwa:

- Saya sih tahunya cuma kalau mau bangun jalan atau bantu warga, itu pakai dana desa. Tapi soal aturan-aturannya, saya gak ngerti. Itu urusan mereka di kantor desa. (AI 01, 2025)

Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemahaman mendalam tentang tata kelola keuangan desa masih terpusat di kalangan pengelola. Masyarakat sebagai pihak penerima manfaat belum diberikan edukasi yang memadai mengenai aspek regulatif pengelolaan keuangan desa. Hal ini menjadi catatan penting karena pemahaman publik terhadap keuangan desa turut mempengaruhi efektivitas partisipasi dan pengawasan sosial.

Pengelola desa menyampaikan bahwa mereka berusaha untuk terbuka kepada masyarakat. Mereka mengatakan bahwa informasi APBDes (rencana penggunaan dana desa) dipasang di baliho depan kantor desa, dan musyawarah desa selalu dilakukan sebelum program dijalankan. Hasil wawancara dengan informan Sekretaris Desa Ia menyampaikan bahwa:

- Setiap kegiatan pasti kami musyawarahkan dulu. APBDes juga kami pasang di papan informasi biar masyarakat tahu, tidak kami sembunyikan. (IF 02 SekDes, 2025)

Namun, berdasarkan wawancara dengan warga, sikap dan persepsi masyarakat terhadap transparansi ini tidak sepenuhnya positif. Masyarakat merasa bahwa meskipun ada penyampaian informasi, cara penyampaiannya kurang efektif. Informasi yang disampaikan umumnya berupa angka-angka tanpa penjelasan naratif yang mudah dimengerti. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pengawasan atau pengambilan keputusan.

Hasil wawancara dengan informan Ketua Rt/Masyarakat Desa Ia menyampaikan bahwa:

- Kalau ada pengumuman kadang kami baca, tapi gak ngerti. Harusnya ada penjelasan langsung dari orang desa, atau sosialisasi. Jangan cuma tempel angka-angka saja. (AI 02, 2025)

Temuan ini menunjukkan adanya gap komunikasi antara pengelola dan masyarakat. Niat untuk transparan memang ada, namun metode penyampaian informasi belum mampu membangun pemahaman masyarakat secara menyeluruh. Akibatnya, prinsip akuntabilitas menjadi lemah karena kontrol sosial dari masyarakat tidak berjalan secara optimal.

Ketika ditanya soal kemungkinan adanya kecurangan atau penyalahgunaan dana, sebagian besar pengelola keuangan desa menyadari bahwa hal itu sangat berbahaya dan bisa berujung pada proses hukum.

Hasil wawancara dengan informan ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Ia menyatakan bahwa:

- Kami tahu risikonya besar. Kalau ada yang berani macam-macam dengan dana desa, bisa ditangkap dan masuk berita. Kami tidak mau itu terjadi di desa kami. (IF 03 BPD, 2025)

Pernyataan ini menunjukkan adanya kesadaran normatif mengenai bahaya fraud. Namun, peneliti juga mencatat adanya pengakuan jujur dari beberapa pengelola bahwa risiko penyimpangan tetap ada, terutama jika pengawasan dari pihak eksternal seperti kecamatan, inspektorat, atau masyarakat tidak berjalan dengan baik. Dalam kondisi demikian, faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, lemahnya kontrol internal, dan adanya peluang bisa menimbulkan godaan untuk melakukan kecurangan.

Hasil wawancara dari bendahara/kaur keuangan ia mengonfirmasi hal tersebut

- Kalau gak ada pengawasan, orang bisa khilaf. Tapi kami selalu saling mengingatkan. Gaji kami juga cukup, jadi jangan cari masalah. (IF 04 Bend, 2025)

Di sisi lain, masyarakat pun memiliki persepsi yang serupa. Mereka percaya bahwa selama ada pengawasan dari BPD, kecamatan, dan inspektorat, maka kecenderungan fraud dapat ditekan. Namun, jika pengawasan melemah atau tidak berjalan secara konsisten, masyarakat merasa khawatir bahwa potensi kecurangan akan muncul, terutama karena informasi keuangan desa sulit dipahami oleh orang awam.

Secara umum, temuan pada indikator ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap dampak kecurangan sudah terbentuk baik di kalangan pengelola maupun masyarakat. Namun, kesadaran ini belum sepenuhnya diiringi dengan sistem pencegahan yang kuat, terutama dalam hal pengawasan partisipatif dari masyarakat yang masih lemah.

Secara keseluruhan, wawancara ini menggambarkan bahwa tingkat pemahaman terhadap aturan pengelolaan keuangan desa cukup baik di kalangan aparat desa, khususnya pada Kepala Desa, Sekretaris, dan Bendahara. Ketiganya memahami bahwa pengelolaan dana desa tidak bisa dilakukan sembarangan, karena ada aturan-aturan yang harus dipatuhi, seperti penyusunan APBDes, pencatatan di buku kas umum, pelaporan triwulan, hingga pertanggungjawaban akhir tahun.

Mereka menunjukkan bahwa sudah mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis dari pemerintah kabupaten, serta terbiasa menggunakan format pelaporan resmi sesuai regulasi seperti Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan aturan keuangan dari tingkat daerah. Pemahaman ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga ditunjukkan dalam praktik sehari-hari, seperti pencatatan transaksi, pengarsipan dokumen, hingga proses pengajuan dana kegiatan.

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelola utama keuangan desa memiliki kesadaran yang tinggi untuk mengikuti aturan yang berlaku, baik karena tanggung jawab moral maupun konsekuensi hukum. Namun demikian, pemahaman ini belum tentu merata

sampai ke tingkat masyarakat atau perangkat non-keuangan, yang menjadi catatan tersendiri dalam mendorong transparansi secara menyeluruh.

Tekanan dalam konteks ini mengacu pada kondisi atau beban tertentu yang dapat mendorong individu untuk melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa tekanan ekonomi pribadi menjadi salah satu hal yang disadari oleh informan sebagai pemicu potensial. Bendahara desa menyatakan:

- Kadang kalau ada kebutuhan mendesak di rumah, kita jadi kepikiran... Tapi kalau semua sesuai prosedur, ya gak bisa sembarang ambil. (IF 04 Bend, 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesadaran bahwa tekanan ekonomi bisa saja mendorong seseorang untuk melakukan tindakan menyimpang, namun keberadaan prosedur dan aturan formal menjadi penghalang utama untuk mencegah tindakan tersebut terjadi. Senada dengan itu, Ketua BPD menambahkan:

- Makanya penting gaji atau honor perangkat desa cukup. Kalau gak cukup, bisa jadi godaan. Itu tekanan juga. (IF 03 BPD, 2025)

Sementara dari pihak masyarakat, khususnya Ketua RT, mempersepsikan tekanan lebih kepada lingkungan kerja yang tidak mendukung:

- Kalau ada yang disuruh tanda tangan cepat-cepat tapi belum jelas, itu juga tekanan. Apalagi kalau bawahan takut sama atasan. (AI 03, 2025)

Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa tekanan yang dirasakan bisa berasal dari kebutuhan ekonomi pribadi maupun tekanan struktural dalam organisasi yang keduanya dapat memicu kecenderungan terjadinya fraud jika tidak dikelola dengan baik.

Kesempatan menjadi salah satu elemen kunci dalam Fraud Diamond, yang mengacu pada kemungkinan seseorang melakukan kecurangan karena lemahnya sistem kontrol atau pengawasan. Sekretaris Desa mengatakan:

- Kalau gak ada yang periksa atau cek, siapa yang tahu kalau ada yang diselewengkan? Apalagi kalau laporan cuma kita yang pegang. (IF 02 SekDes, 2025)

Hal ini menandakan bahwa walaupun secara formal terdapat sistem pelaporan, namun bila pengawasan hanya dilakukan internal atau bersifat formalitas, maka potensi untuk menyimpang tetap terbuka. Kepala Desa juga menyampaikan:

- Kami usahakan semua transparan. Tapi saya akui, kadang masih kurang kontrol dari luar. Harusnya lebih sering ada audit dari kecamatan atau inspektorat. (IF 01 KepDes, 2025)

Sedangkan masyarakat, melalui pernyataan Ketua RT, menyampaikan:

- Kami tidak tahu laporan itu dibaca siapa. Kalau hanya ditempel, ya gak ada gunanya. Harusnya ada pertemuan rutin untuk bahas uang desa. (AI 04, 2025)

Rasionalisasi merupakan pembenaran subjektif yang dilakukan oleh pelaku kecurangan untuk menjustifikasi perbuatannya. Dalam wawancara, beberapa pengelola menyadari bahwa pembenaran semacam ini bisa saja terjadi dalam situasi tertentu. Ketua RT menyampaikan :

- Kadang orang bisa mikir, ini juga saya yang kerja, capek-capek ngurus, jadi wajar kalau ambil sedikit. Tapi itu tetap salah. (AI 05, 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan eksternal dan tidak optimalnya kontrol sosial dari masyarakat dapat menciptakan ruang (opportunity) untuk terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Rasionalisasi merupakan pembenaran subjektif yang dilakukan oleh pelaku kecurangan untuk menjustifikasi perbuatannya. Dalam wawancara, beberapa pengelola menyadari bahwa pembenaran semacam ini bisa saja terjadi dalam situasi tertentu. Ketua RT menyampaikan :

- Kadang orang bisa mikir, ini juga saya yang kerja, capek-capek ngurus, jadi wajar kalau ambil sedikit. Tapi itu tetap salah. (AI 05, 2025)

Pernyataan tersebut menggambarkan adanya kesadaran bahwa rasionalisasi dapat muncul dari persepsi tentang ketidakadilan atau beban kerja yang dirasa tidak sepadan. Sekretaris Desa juga menyampaikan:

- Kami ingatkan terus, jangan sampai pikir karena tidak ada yang tahu, jadi boleh-boleh saja. Itu yang bahaya. (IF 02 SekDes, 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran moral di internal pengelola desa untuk mencegah munculnya rasionalisasi yang keliru. Dari sisi masyarakat, warga RT mengungkapkan:

- Kalau yang atur uang merasa tidak diperhatikan atau dihargai, bisa saja jadi nekat. Lalu mereka berpikir, 'ini hak saya juga'. (AI 06, 2025)

Temuan ini menunjukkan bahwa faktor psikologis dan sosial bisa menjadi landasan terbentuknya rasionalisasi yang berbahaya, apabila tidak disertai dengan penguatan nilai etika dan integritas.

Kapabilitas berhubungan dengan kemampuan teknis, pengetahuan, serta posisi strategis seseorang untuk melakukan dan menutupi fraud. Semakin tinggi posisi dan penguasaan terhadap sistem, semakin besar kemungkinan seseorang memiliki peluang untuk melakukan penyimpangan. Kepala Desa Menyatakan :

- Yang ngerti sistem, ya bisa aja akalin laporan. Tapi itu tergantung orangnya juga, kalau niat jahat, pasti bisa aja cari celah. (IF 01 KepDes ,2025)
- Pernyataan ini menekankan bahwa orang yang menguasai sistem keuangan desa memiliki potensi lebih besar untuk menyalahgunakannya, walaupun faktor moral tetap menjadi penentu akhir. Sementara itu, Ketua BPD menambahkan:
- Kami juga butuh pelatihan supaya bisa mengimbangi kemampuan teknis mereka. Jangan cuma perangkat desa yang bisa baca laporan. (IF 03 BPD ,2025)
- Masyarakat menyadari hal yang sama, seperti disampaikan oleh warga RT
- Kadang masyarakat gak bisa tanya banyak, karena gak ngerti istilah- istilah di laporan. Kalau yang jaga uang pinter, kita gak bisa tahu kalau ada yang disembunyikan. (AI 07, 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa kapabilitas bisa menjadi pedang bermata dua membantu transparansi, namun juga bisa dimanfaatkan untuk menyembunyikan kecurangan jika pengawasan tidak seimbang.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa kecenderungan terjadinya kecurangan akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Gas Alam dapat dijelaskan secara komprehensif melalui Fraud Diamond Theory. Keempat elemen tersebut—tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), rasionalisasi (rationalization), dan kapabilitas (capability)—saling berinteraksi dan membentuk situasi yang dapat membuka peluang terjadinya fraud, terutama jika tidak dibarengi dengan sistem pengawasan yang kuat, pembinaan moral yang berkelanjutan, serta partisipasi masyarakat yang aktif.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pengelola keuangan desa dan masyarakat di Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak, dapat disimpulkan bahwa pemahaman perangkat desa mengenai regulasi pengelolaan dana, termasuk Permendagri No. 20 Tahun 2018, sudah cukup baik. Kepala Desa, Sekretaris, dan Bendahara memiliki kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Namun, pengetahuan tersebut belum sepenuhnya menjangkau masyarakat luas, karena sebagian besar warga hanya mengetahui dana desa sebatas pada pembangunan fisik, tanpa memahami proses keuangannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontrol sosial dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih lemah.

Analisis menggunakan Fraud Diamond Theory menunjukkan bahwa potensi kecurangan akuntansi tetap menjadi ancaman yang nyata. Tekanan ekonomi dan struktural menjadi faktor pemicu utama, sementara lemahnya sistem pengawasan memberikan peluang terjadinya penyimpangan. Walaupun rasionalisasi belum terlihat secara jelas, kemampuan teknis yang dimiliki perangkat desa tetap berisiko disalahgunakan apabila tidak disertai etika dan integritas. Dengan demikian, keberadaan tekanan, peluang, rasionalisasi, dan kemampuan perlu dikelola secara hati-hati agar tidak berkembang menjadi praktik fraud.

Lebih lanjut, persepsi pengelola keuangan desa terhadap potensi kecurangan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan teknis, budaya organisasi, sistem pengawasan, dan kepemimpinan kepala desa. Perangkat desa yang memiliki pengalaman dan pelatihan memadai cenderung lebih waspada terhadap risiko penyimpangan. Selain itu, kepemimpinan yang bersih serta budaya kerja yang mendorong transparansi turut memperkuat pencegahan kecurangan. Akan tetapi, keterlibatan masyarakat yang masih rendah dan literasi publik yang terbatas dalam bidang keuangan desa menjadi hambatan besar dalam mewujudkan tata kelola yang akuntabel.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa meskipun regulasi telah diterapkan dan kesadaran normatif mulai terbentuk di kalangan perangkat desa, potensi terjadinya kecurangan akuntansi tetap ada. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat sistem pengawasan, menumbuhkan budaya organisasi yang beretika, serta meningkatkan pemahaman masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi. Langkah-langkah tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik kecurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariansyah, Fuad. 2020. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Budaya Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar (Doctoral Dissertation).
- Arthana, I, Komang. 2019. Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur. Jurnal Akuntansi : Transparansi dan Akuntabilitas, Vol 07. No. 01.
- Chandra, D. P. & Ikhsan, S. 2015. Determinan Terjadinya Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) Pada Dinas Pemerintah Se Kabupaten Grobongan. Jurnal Akuntansi, 4(3), 1-9.
- Eliza, Yulina. (2015). Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada SKPD di Kota Padang). Jurnal Akuntansi, Vol.4 No.1. Hal 86-100 Padang: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perdagangan Padang.
- Fauzya. 2017. Pengaruh Keefektifan Sistem Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Individu, dan Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis sebagai Variabel Intervening Pada BPPKAD Kabupaten Siagen. 1-149.
- Fitriyah, Adinda dan Munari. 2021. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Fraud Akuntansi Di Pemerintahan Desa Se-Kecamatan Kedamean. Jurnal Universitas Pembangunan Nasional. Vol 01. No.01.
- Gustarina, Devi. Azmi, Zul. Dan Neng, Muriati. 2021. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Pada Rumah Sakit Kota Pekanbaru. Jurnal Ekonomi Bisnis & Akuntansi: Vol 01..
- <https://www.goriau.com/berita/baca/korupsi-dana-desa-rp5766-juta-salahseorang-kades-di-kuansing-resmi-ditahan.html>, di akses 29 November 2021.
- Huljanah, Dwi Nur. 2019. Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2011). Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Islamiyah, Faridatul. 2020. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, dan Whistleblowing terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wajak (Studi Empiris Pada Desa Sukoanyar, Desa Wajak, Desa Sukolilo, Desa Blayu dan Desa Patokpicias). Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Vol 08. No.01 Tahun 2020.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). Kebijakan Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Desa. <https://www.djpk.depkeu.go.id>
- Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar) JOM Fekon, 3.

- Kusumastuti, Nur.R., & Meiranto, Wahyu. (2012) Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Journal of Accounting*, Volume 1 No. 1. Hal 1-15 Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kyalo, Shandrack., Kalio, Aquilars., & Ngahu, Solomon. (2014). Role of Fraud Prevention in Enhancing Effective Financial Reporting in County Governments in Kenya: Case of Nakuru County, Kenya. *International Journal of Science and Research*, Volume 3 Issue 10 October 2014 Kenya: JKUAT.
- Lou, Yung., & Wang, Ming. (2009). Fraud Risk Factor Of The Fraud Triangle Assessing The Likelihood Of Fraudulent Financial Reporting. *Journal of Business & Economics Research*, Vol.7 No.2. Taiwan: Nan Hua University
- Mustikasari, Dhermawati. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di sektor Pemerintahan Kabupaten Batang. *Accounting Analysis Journal* 2 (3). Semarang : Univeristas Negeri Semarang.
- Najahningrum, Anik. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud: Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY. *Accounting Analysis Journal* 2(3). Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Noviyanti, Nur., & Kiswanto. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal* 5 (1). Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Nurjanah. (2008). Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Komitmen Organisasi Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan (Studi Pada Biro Lingkup Departemen Pertanian). Disertasi. Semarang: UNDIP.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai kartanegara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.
- Pradnyani, Ni Luh Putu. (2014). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Asimetri Informasi pada Akuntabilitas Organisasi dengan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi sebagai Variabel Intervening. Tesis. Denpasar: Universitas Udayana.
- Pristiyanti, Ika. (2012) .Persepsi Pegawai Instansi Pemerintah Mengenai FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan. *Accounting Analysis Journal* 1 (1). Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Kepala Desa (IF01), 2025. —Pemahaman Regulasi dan Prosedur Pengelolaan Dana Desa. Wawancara Pribadi, Desa Gas Alam, Mei 2025.
- Ketua Rt/Masyarakat Desa (AI01) 2025 — Pemahaman Regulasi dan Prosedur Pengelolaan Dana Desa. — Wawancara Pribadi, Desa Gas Alam, Mei 2025
- Sekretaris Desa (IF02), 2025. —Transparansi dan Akuntabilitas . Wawancara Pribadi, Desa Gas Alam, Mei 2025.
- Ketua Rt/Masyarakat Desa (AI02) 2025. —Transparansi dan Akuntabilitas. Wawancara Pribadi

, Desa Gas Alam, Mei 2025

Bendahara/Kaur Keuangan (IF03), 2025. —Risiko Kecurangan, Tekanan Ekonomi, dan Kontrol Internal.‖ Wawancara Pribadi, Desa Gas Alam, Mei 2025.

BPD (IF04) 2025. — Kesadaran Terhadap Konsekuensi Kecurangan Akuntansi.‖ Wawancara Pribadi, Desa Gas Alam, Mei 2025

Bendahara/Kaur Keuangan(IF03), 2025. — Kesadaran Terhadap Konsekuensi Kecurangan Akuntansi.‖ Wawancara Pribadi, Desa Gas Alam, Mei 2025

Bendahara/Kaur Keuangan (IF03),2025. —Accounting Fraud Tendency,Pressure (Tekanan).‖ Wawancara Pribadi, Desa Gas Alam, Mei 2025

BPD (IF04) 2025 —Accounting Fraud Tendency,Pressure (Tekanan).‖ Wawancara Pribadi, Desa Gas Alam, Mei 2025

Ketua Rt/Masyarakat Desa (AI03), 2025 Accounting Fraud Tendency,Pressure (Tekanan).‖ Wawancara Pribadi, Desa Gas Alam, Mei 2025

Ketua RT/Masyarakat Desa (AI03), 2025. "Accounting Fraud Tendency, Pressure (Tekanan)." Wawancara Pribadi, Desa Gas Alam, Mei 2025.

Ketua RT/Masyarakat Desa (AI04), 2025. "Partisipasi dalam Pengawasan Dana Desa dan Kendala Sosialisasi." Wawancara Pribadi, Desa Gas Alam, Mei 2025.

Ketua RT/Masyarakat Desa (AI05), 2025. "Rasionalisasi dan Persepsi Terhadap Keuangan Desa." Wawancara Pribadi, Desa Gas Alam, Mei 2025.

Ketua BPD (IF04), 2025. —Persepsi terhadap Fraud dan Pengawasan Dana Desa.‖ Wawancara Pribadi, Desa Gas Alam, Mei 2025.

Ketua RT/Masyarakat Desa (AI01–AI03), 2025. —Pemahaman dan Partisipasi dalam Pengawasan Dana Desa.‖ Wawancara Pribadi, Desa Gas Alam, Mei 2025